

# LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2025

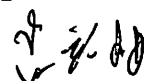
PT BPR Syariah Harta Insan Karimah



Menara HIK Jl. HOS Cokroaminoto no 17 Karang Timur,  
Karang Tengah, Kota Tangerang Telp. (021) 7301456  
[www.bprshik.co.id](http://www.bprshik.co.id)

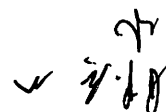
## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	1
BAB I PENJELASAN UMUM LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA .....	2
BAB II LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA .....	3
A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN SENDIRI ( <i>SELF ASSESSMENT</i> ) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR SYARIAH .....	3
B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA .....	4
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi .....	4
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris .....	8
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah .....	10
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite .....	12
C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI .....	16
1. Kepemilikan Saham di BPR Syariah HIK .....	16
2. Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain .....	16
D. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI SAMPAI DERAJAT KEDUA DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DPS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM .....	16
E. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS .....	17
1. Kepemilikan Saham di BPR Syariah HIK .....	17
2. Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain.....	17
F. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS SAMPAI DERAJAT KEDUA DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DPS, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM .....	17
G. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) .....	18
1. Kepemilikan Saham di BPR Syariah HIK .....	18
2. Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain.....	18
H. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DPS SAMPAI DERAJAT KEDUA DENGAN ANGGOTA DPS LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM .....	18
I. RANGKAP JABATAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) .....	19
J. PAKET ATAU KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS BAGI DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DPS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN RUPS .....	19
K. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH .....	20
L. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS).....	20
1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 Tahun .....	20
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris .....	23
3. Penyelenggaraan Rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam 1 Tahun .....	24
4. Kehadiran Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) .....	27
M. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN .....	28
N. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN .....	28
O. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN .....	28
P. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN TERMASUK KEGIATAN POLITIK .....	29



**BAB I**  
**PENJELASAN UMUM LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA**

Alamat Kantor	: Menara HIK, Jalan HOS Cokroaminoto No. 17 Kelurahan Karang Timur Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten
Nomor Telepon	: 021-730 1456
Penjelasan Umum	<p>Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola mengacu kepada :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- POJK No. 09 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPR Syariah.</li><li>- POJK No. 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan OJK dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi BPR dan BPR Syariah.</li><li>- POJK No. 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi BPR Syariah.</li><li>- SEOJK No. 17/SEOJK.03/2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan OJK dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi BPR Syariah.</li><li>- SEOJK No. 15/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah.</li></ul> <p>Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola memuat data yang dibutuhkan sesuai dengan format terbaru pada Apolo Modul Laporan Tahunan sebagaimana diatur dalam SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2025 sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Ringkasan hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) atas pelaksanaan Tata Kelola BPR Syariah.</li><li>B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola.</li><li>C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi.</li><li>D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Sampai Derajat Kedua Dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS dan/atau Pemegang Saham.</li><li>E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris.</li><li>F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Sampai Derajat Kedua Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi, Anggota DPS, dan/atau Pemegang Saham.</li><li>G. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS).</li><li>H. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota DPS Sampai Derajat Kedua Dengan Anggota DPS Lain, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham.</li><li>I. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah.</li><li>J. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.</li><li>K. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.</li><li>L. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan DPS.</li><li>M. Jumlah Penyimpangan Intern yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian.</li><li>N. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian.</li><li>O. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.</li><li>P. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain termasuk Kegiatan Politik.</li></ul>



**BAB II**  
**LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA**

**A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR SYARIAH HARTA INSAN KARIMAH**

BPR Syariah Harta Insan Karimah telah melakukan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) yang mencakup 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu: Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola, Proses Penerapan Tata Kelola, dan Hasil Pelaksanaan Tata Kelola.

Laporan penilaian sendiri sebagaimana diatur dalam SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah, mencakup 13 (tiga belas) faktor penilaian pelaksanaan tata kelola yaitu:

1. Aspek pemegang saham
2. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi
3. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris.
4. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang DPS
5. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
6. Penanganan benturan kepentingan
7. Penerapan fungsi kepatuhan
8. Penerapan fungsi audit intern
9. Penerapan fungsi audit ekstern
10. Penerapan manajemen risiko dan strategi anti *fraud*, termasuk sistem pengendalian intern
11. Batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah
12. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi
13. Rencana bisnis BPR Syariah.

Adapun hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola BPR Syariah Harta Insan Karimah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Nama BPR Syariah : PT BPR Syariah Harta Insan Karimah  
Posisi : Desember 2025 (Semester II)

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Nilai Komposit
Nilai Faktor	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1	1
Predikat Komposit	1 (Sangat Baik)													
<b>Kesimpulan Akhir</b>														
<p>Merujuk pada analisis sebagaimana diungkapkan pada kertas kerja <i>self assessment</i> Penerapan Tata Kelola PT BPR Syariah HIK Semester II tahun 2025 secara umum adalah 1. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola maka akan menjadi perhatian dan akan diselesaikan.</p>														

<b>Faktor Positif</b>
<p>Berisikan rangkuman faktor positif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola.</p> <p>a. Struktur Sangat Memadai</p> <p>b. Proses Sangat Memadai</p> <p>c. Hasil Sangat Memadai</p>
<b>Faktor Negatif</b>
<p>Berisikan rangkuman faktor negatif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola.</p> <p>a. Struktur Struktur sudah sangat memadai sehingga <i>factor negative</i> sangat minim</p> <p>b. Proses Proses sudah sangat memadai sehingga <i>factor negative</i> sangat minim</p> <p>c. Hasil Hasil sudah sangat memadai sehingga <i>factor negative</i> sangat minim</p>

**B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA**

Dalam upaya penerapan Tata Kelola yang baik, maka berikut ini adalah informasi mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Komite di BPR Syariah HIK :

**1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Alfi Wijaya	Direktur Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun strategi dan arah kebijakan Rencana Bisnis jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.</li> <li>2. Menyusun strategi dan arah kebijakan strategis khususnya terkait penyelesaian nasabah bermasalah, penerapan manajemen risiko dan tindak lanjut hasil audit.</li> <li>3. Melakukan pengelolaan perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar BPR Syariah dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</li> <li>4. Menjalankan pengelolaan perusahaan dengan memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.</li> <li>5. Menerapkan Tata Kelola yang baik, Manajemen Risiko dan Keptuhan, dalam setiap kegiatan usaha BPR Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li> </ol>

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
			<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPR Syariah, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</li> <li>7. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.</li> <li>8. Memberikan arahan dan melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap aktivitas unit kerja dibawah supervisi Direktur Utama.</li> <li>9. Memastikan agar koordinasi, kolaborasi dan komunikasi antar unit kerja yang berada dibawah supervisi Direktur Utama berjalan dengan baik.</li> <li>10. Memberikan persetujuan atas permohonan pembiayaan, tanggapan Komite Legal sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.</li> <li>11. Bersama-sama jajaran Direksi lain bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</li> </ol>
2.	Rahmat Mauludin	Direktur Bisnis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan perusahaan terkait aspek bisnis.</li> <li>2. Menyusun strategi dan arah kebijakan rencana bisnis dalam bidang penghimpunan dana, baik produk Tabungan maupun Deposito.</li> <li>3. Menyusun strategi dan arah kebijakan rencana bisnis dalam bidang penyaluran dana (Pembiayaan), termasuk monitoring proses penagihan angsuran khususnya nasabah lancar dan menjaga nasabah lancar agar tidak <i>flow</i> menjadi nasabah bermasalah.</li> <li>4. Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip syariah.</li> <li>5. Menerapkan tata kelola yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan dalam setiap kegiatan usaha BPR Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li> <li>6. Melakukan monitoring perkembangan bisnis penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan di Kantor Cabang maupun Kantor Kas.</li> </ol>

*Handwritten signature/initials*

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
			<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Memberikan arahan dan melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap aktivitas unit kerja dibawah supervisi Direktur Bisnis.</li> <li>8. Memastikan agar koordinasi, kolaborasi dan komunikasi antar unit kerja yang berada dibawah supervisi Direktur Bisnis berjalan dengan baik.</li> <li>9. Memberikan persetujuan atas permohonan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.</li> <li>10. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit intern dan auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.</li> <li>11. Bersama-sama jajaran Direksi lain bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</li> </ol>
3.	Denny Satria Irawan	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR Syariah tidak menyimpang dari ketentuan intern BPR Syariah, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan prinsip syariah; serta pemenuhan terhadap seluruh komitmen BPR Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lain yang berwenang.</li> <li>2. Memberikan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinions</i>) dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan intern BPR Syariah, ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Prinsip Syariah.</li> <li>3. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait ketentuan intern, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang dan Ketentuan Syariah.</li> <li>4. Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip syariah.</li> <li>5. Menerapkan tata kelola yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan, dalam setiap kegiatan usaha BPR Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li> <li>6. Melaporkan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris apabila terdapat pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Pegawai maupun Direksi BPR Syariah.</li> </ol>

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
			<p>7. Melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.</p> <p>8. Memastikan tersedianya kebijakan dan prosedur, serta melakukan supervisi penyusunan kebijakan dan prosedur tersebut.</p> <p>9. Memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian laporan-laporan yang disampaikan ke OJK, LPS, dan Instansi lainnya.</p> <p>10. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit intern dan auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.</p> <p>11. Bersama-sama jajaran Direksi lain bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p>

<b>Tindak Lanjut Rekomendasi</b> <b>Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi telah melaksanakan langkah-langkah strategis untuk mencapai target RBB 2025 melalui:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Implementasi Tata Kelola dan Manajemen Risiko yang baik diantaranya melalui proses revitalisasi organisasi, pengembangan SDM dengan pelaksanaan training, serta penerapan budaya Perusahaan.</li> <li>b. Fokus pada pencapaian target portofolio dan laba perusahaan serta rencana pengembangan produk dan aktivitas baru yang tercantum dalam RBB 2025.</li> <li>c. Fokus mengawal peningkatan kualitas pembiayaan dan upaya-upaya penyelesaian nasabah bermasalah.</li> </ol> </li> <li>2. Direksi telah mengoptimalkan peningkatan komposisi pembiayaan retail melalui strategi ekspansi yang terukur, sambil menjaga kontribusi pembiayaan komersil untuk memastikan portofolio pembiayaan yang sehat dan berkualitas.</li> <li>3. Direksi telah melakukan akselerasi peningkatan dana murah Tabungan melalui layanan komunitas, baik itu sekolah maupun komunitas lainnya.</li> <li>4. Direksi telah merumuskan strategi bisnis yang tepat dalam merespon proses penggabungan BPR Syariah HIK Bekasi dengan BPR Syariah HIK serta mempersiapkan rencana strategis lainnya dari sisi Operasional, SDM dan IT.</li> <li>5. Direksi telah melakukan upaya pencapaian laba perusahaan dengan cara meningkatkan pendapatan dan menjalankan program efisiensi diseluruh unit kerja.</li> <li>6. Direksi telah melakukan penyusunan dan/atau melakukan pengkinian SOP yang memuat mekanisme kerja, fungsi dan wewenang terkait Kepatuhan dan Tata Kelola, serta Manajemen Risiko.</li> <li>7. Direksi telah melakukan pemetaan data nasabah potensial, Nasabah Tabungan lama yang berpotensi untuk migrasi dan meningkatkan saldo, melakukan agenda silaturahmi, melakukan pemasaran dengan postingan di media sosial, serta melakukan agenda Silaturahmi Mitra Sekolah (SMS) dan HIK <i>Goes to School</i> (HGS) pada tahun 2025.</li> </ol>	

**2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Zahrul Hadiprabowo	Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjalankan fungsi Komisaris Utama untuk mengkoordinir pelaksanaan aktivitas Dewan Komisaris maupun berkoordinasi dengan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.</li> <li>2. Memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BPR Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li> <li>3. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan rekomendasi kepada Direksi.</li> <li>4. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR Syariah HIK.</li> <li>5. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPR Syariah, kecuali terkait dengan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana; dan</li> <li>b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</li> </ol> </li> <li>6. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</li> <li>7. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat berkala Dewan Komisaris.</li> <li>8. Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang secara independen.</li> </ol>
2.	Noraini Bawazier	Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BPR Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li> <li>2. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan rekomendasi kepada Direksi.</li> <li>3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR Syariah.</li> <li>4. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPR Syariah, kecuali terkait dengan:</li> </ol>

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana; dan</li> <li>b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</li> </ul> <p>5. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>6. Menilai dan memberikan saran terkait rencana kerja, anggaran, dan strategi manajemen, khususnya atas pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Remunerasi.</p>
3.	Agus Darmawan	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BPR Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li> <li>2. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan rekomendasi kepada Direksi.</li> <li>3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR Syariah.</li> <li>4. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPR Syariah, kecuali terkait dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana; dan</li> <li>b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</li> </ul> </li> <li>5. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</li> <li>6. Menilai dan memberikan saran terkait rencana kerja, anggaran, dan strategi manajemen, khususnya atas pelaksanaan kebijakan Bisnis dan Manajemen Risiko.</li> <li>7. Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang secara independen.</li> </ul>

**Rekomendasi Kepada Direksi**

1. Direksi dapat terus fokus untuk mendorong pencapaian RBB 2025 dan dapat melaksanakan langkah-langkah strategis yang telah direncanakan.
2. Direksi dapat menindaklanjuti hasil pemeriksaan OJK Tahun 2025 dimana implikasi terbesar atas hasil pemeriksaan tersebut adalah pada aspek keuangan yakni terdapatnya kenaikan NPF dan PPAP yang menekan laba perusahaan.
3. Direksi dapat menyusun langkah-langkah strategis yang akan dilakukan terkait persiapan merger dengan HIK Bekasi, termasuk melakukan pemetaan atas permasalahan HIK Bekasi serta perumusan solusi tepat yang akan diambil.
4. Direksi agar melakukan penguatan manajemen risiko terhadap pembiayaan segmen komersial dan pengembangan pembiayaan segmen retail.
5. Direksi dapat menerapkan Regulasi yang berlaku termasuk pemenuhan laporan-laporan kepada regulator dan pihak eksternal lain sesuai ketentuan.

**3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS**

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Dede Abdul Fatah	Ketua DPS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjalankan fungsi Ketua DPS untuk mengkoordinir pelaksanaan aktivitas DPS maupun berkoordinasi dengan Direksi dan Dewan Komisaris.</li> <li>2. Mengevaluasi kebijakan dan Standar Prosedur Operasional BPR Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah.</li> <li>3. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPR Syariah agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.</li> <li>4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPR Syariah.</li> <li>5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPR Syariah untuk pelaksanaan tugasnya.</li> <li>6. Melakukan evaluasi pelaksanaan tata kelola syariah dan kepatuhan syariah.</li> <li>7. Menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada OJK.</li> </ol>
2.	Sutedjo Prihatono	Anggota DPS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.</li> <li>2. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.</li> <li>3. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPR Syariah.</li> <li>4. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya.</li> </ol>

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
			5. Melakukan evaluasi pelaksanaan tata kelola syariah dan kepatuhan syariah. 6. Menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada OJK .

#### Rekomendasi DPS Kepada Direksi

DPS telah memberikan Rekomendasi dalam bentuk Opini Sebanyak 17 Opini dengan pokok pembahasan :

1. Penempatan Dana di Bank Konvensional
2. Akad *Murabahah* dan *Ijarah* Pembiayaan Ultra Mikro
3. Implementasi Pengelolaan Deposito dan Tabungan ex Nasabah BPR Syariah HIK Bekasi Terkait Proses Merger antara BPR Syariah HIK dengan BPR Syariah HIK Bekasi
4. Implementasi Pengelolaan Migrasi Produk Tabungan dan Rekening *Escrow* Nasabah BPR Syariah HIK Bekasi terkait Proses Merger HIK Bekasi kedalam BPR Syariah HIK
5. Implementasi Pengelolaan Migrasi Produk Tabungan dan Rekening *Escrow* Nasabah BPR Syariah HIK terkait Proses Merger BPR Syariah HIK Bekasi kedalam BPR Syariah HIK
6. Perlakuan Komitmen *Rate* Deposito untuk Nasabah Kantor Cabang Ciledug atas Nama Yayasan Dana Sejahtera Mandiri
7. Penyewaan Aset Tetap Bank kepada Pihak Eksternal
8. Hasil Review terhadap Nasabah Pembiayaan an Enjat Sujatna dan PT Saputera Mega Properti
9. Implementasi Produk *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) di BPR Syariah HIK
10. Sumber Dana Penyelesaian Pembiayaan *Channeling* Skema Baru, Pembiayaan *Channeling* Skema Lama dan Pembiayaan *Executing* yang pernah dikerjasamakan dengan KSPPS KUMB
11. Produk *Cash Waqf Linked Deposit* Bekerja Sama dengan Nazhir PPPA Darul Qur'an
12. Teknis Distribusi Alokasi Sebagian Margin dan/atau Ujrah Pembiayaan Ultra Mikro Berbasis Kelompok (PUM-BK) untuk Penyelesaian Pembiayaan BPR Syariah HIK yang bekerjasama dengan KSPPS KUMB
13. Pengakuan Marjin Pendapatan pada *Case* Nasabah Pembiayaan a.n. PT Saputra Mega Properti
14. Penyelenggaraan Produk Dasar Baru *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD)
15. Pembiayaan Guru Bersertifikasi
16. Penggunaan Akad *Qardh* Terkait Permasalahan *Fraud* yang telah dilakukan Mantan Pegawai
17. Program Promo Akhir Tahun 2025 Dalam Rangka Penguatan Likuiditas dan Peningkatan Portofolio DPK (Dana Pihak Ketiga).

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
111/HIK/VIII/2025	07 Agustus 2025	018/HIK/I/2026	19 Januari 2026

4. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit	<p>1. Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi atas:</p> <p>a. Perencanaan dan pelaksanaan audit; dan</p> <p>b. Pemantauan tindak lanjut hasil audit.</p> <p>2. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 1, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap paling sedikit:</p> <p>a. Pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern;</p> <p>b. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan</p> <p>c. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR Syariah, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.</p> <p>3. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin 2 digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.</p>	Menyusun pedoman tata tertib kerja Komite Audit	Telah disusun pedoman dan tata tertib kerja Komite Audit	1 Kali

*Handwritten signature and initials*

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
		4. Selain melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin II.C.1, Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.			
2	Komite Pemantau Risiko	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan BPR Syariah HIK.</li> <li>2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.</li> <li>3. Hasil evaluasi serta pemantauan tersebut digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.</li> </ol>	Menyusun pedoman tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko	Telah disusun pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko	1 Kali
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan Remunerasi paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pencapaian kinerja, kewajaran dengan</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan rekomendasi mengenai calon pengurus Bank baik anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Membuat kebijakan Remunerasi bagi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS kepada Dewan Komisaris untuk</li> </ol>	2 Kali

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
		<p><i>peer group</i>, dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang; dan</p> <p>2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi.</p> <p>b. Kebijakan Nominasi paling sedikit:</p> <p>1) Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah bagi BPR Syariah;</p> <p>2) Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah bagi BPR Syariah; dan</p> <p>3) Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit serta anggota Komite Pemantau Risiko.</p>	<p>Pengurus &amp; Pegawai</p> <p>2. Menyusun pedoman tata tertib kerja Komite Remunerasi dan Nominasi</p>	<p>disampaikan kepada RUPS.</p> <p>2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>3. Memberikan rekomendasi besaran remunerasi tahun 2025 untuk pengurus (Dewan Komisaris, Direksi &amp; Dewan Pengawas Syariah) untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>4. Telah disusun pedoman dan tata tertib kerja Komite Remunerasi dan Nominasi</p>	

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
		2. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang memiliki benturan kepentingan dengan usulan pengangkatan dan/atau penggantian yang direkomendasikan wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan.			

## 2. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No	Nama Anggota Komite	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
			Audit	Peman-tau Risiko	Remune-rasi dan Nominasi	Mana-jemen Risiko	Komite Lainnya	
1	Zahrul Hadiprabowo	Komisaris Utama	Ketua Komite sekaligus merangkap Anggota Komite	Tidak	Ketua Komite	Tidak	Tidak	Tidak
2	Noraini Bawazier	Komisaris	Tidak	Tidak	Anggota Komite	Tidak	Tidak	Tidak
3	Agus Darmawan	Komisaris Independen	Tidak	Ketua Komite sekaligus merangkap Anggota Komite	Anggota Komite	Tidak	Tidak	Tidak
4	Ida Syofiatulhuda	<i>Human Capital, Corporate Culture &amp; Building Management Division Head</i>	Tidak	Tidak	Anggota Komite	Tidak	Tidak	Tidak
5	Irwan Maulana	Perwakilan Pemegang Saham Pengendali	Tidak	Tidak	Anggota Komite	Tidak	Tidak	Tidak

28  
K. J. Adh

No	Nama Anggota Komite	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Komite Lainnya	
		(PT Induk HIK)						
6	Dede Abdul Fatah	Ketua DPS	Anggota Komite	Anggota Komite	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
7	Sutedjo Prihatono	Anggota DPS	Anggota Komite	Anggota Komite	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

### C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

#### 1. Kepemilikan Saham Direksi di BPR Syariah HIK

No.	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	Alfi Wijaya	Rp.81.100.000,-	0,17	Rp.81.100.000,-	0,17
2.	Rahmat Mauludin	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Denny Satria Irawan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

#### 2. Kepemilikan Saham Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Alfi Wijaya	PT Induk Harta Insan Karimah	0,04%
2.	Rahmat Mauludin	Nihil	Nihil
3.	Denny Satria Irawan	Nihil	Nihil

### D. HUBUNGAN KEUANGAN, HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI SAMPAI DERAJAT KEDUA DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DPS DAN PEMEGANG SAHAM

#### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan			
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Anggota DPS	Pemegang Saham
1.	Alfi Wijaya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Rahmat Mauludin	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Denny Satria Irawan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

**2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi**

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga			
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Anggota DPS	Pemegang Saham
1.	Alfi Wijaya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Rahmat Mauludin	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Denny Satria Irawan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

**E. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS**

**1. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris di BPR Syariah HIK**

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	Zahrul Hadiprabowo	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Noraini Bawazier	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Agus Darmawan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

**2. Kepemilikan Saham Anggota Komisaris pada Perusahaan Lain**

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Zahrul Hadiprabowo	1. PT BPRS Mitra Cahaya Indonesia	0,19%
		2. PT BPRS HIK Cibitung	2,60%
		3. PT BPRS HIK Bekasi	0,50%
		4. PT Induk Harta Insan Karimah	0,19%
2.	Noraini Bawazier	1. PT BPRS HIK Bekasi	0,39%
		2. PT BPRS Mitra Cahaya Indonesia	1,93%
		3. PT BPRS HIK Parahyangan	4,31%
		4. PT BPRS Hikmah Khazanah	4,03%
		5. PT Induk Harta Insan Karimah	5,50%
		6. PT Barkun Citra Nusantara	25,00%
3.	Agus Darmawan	Nihil	Nihil

**F. HUBUNGAN KEUANGAN, HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS SAMPAI DERAJAT KEDUA DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DPS, PEMEGANG SAHAM**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Komisaris**

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan			
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Anggota DPS	Pemegang Saham
1.	Zahrul Hadiprabowo	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Noraini Bawazier	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Agus Darmawan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*Handwritten signature/initials*

**2. Hubungan Keluarga Anggota Komisaris**

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga			
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Anggota DPS	Pemegang Saham
1.	Zahrul Hadiprabowo	Nihil	Nihil	Nihil	Endang Wardiyati - Istri Rais Nur Arief - Anak Ulya Khalid - Anak Salwa Fauzia - Anak
2.	Noraini Bawazier	Nihil	Nihil	Nihil	Mohammad Yamin - Saudara Kandung
3.	Agus Darmawan	Nihil	Nihil	Nihil	Linda Royyan – Istri

**G. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DPS**

**1. Kepemilikan Saham Dewan DPS di BPR Syariah HIK**

No.	Nama Anggota DPS	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	Dede Abdul Fatah	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Sutedjo Prihatono	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

**2. Kepemilikan Saham Anggota DPS pada Perusahaan Lain**

No.	Nama Anggota DPS	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Dede Abdul Fatah	Nihil	Nihil
2.	Sutedjo Prihatono	Nihil	Nihil

**H. HUBUNGAN KEUANGAN, HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DPS SAMPAI DERAJAT KEDUA DENGAN ANGGOTA DPS LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI, PEMEGANG SAHAM**

**1. Hubungan Keuangan Anggota DPS**

No.	Nama Anggota DPS	Hubungan Keuangan			
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Anggota DPS	Pemegang Saham
1.	Dede Abdul Fatah	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Sutedjo Prihatono	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

**2. Hubungan Keluarga Anggota DPS**

No.	Nama Anggota DPS	Hubungan Keluarga			
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Anggota DPS	Pemegang Saham
1.	Dede Abdul Fatah	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Sutedjo Prihatono	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

I. RANGKAP JABATAN DPS

No.	Nama Anggota DPS	Rangkap Jabatan			
		Anggota DPS BPR Syariah Lain	Anggota DPS LJKS	Anggota Komisaris LJK Lain	Jabatan Pada Organisasi/Perusahaan/Badan Usaha Lain
1.	Dede Abdul Fatah	BPRS Hikmah Bahari (620174)	Nihil	Nihil	Ketua DPS
2.	Sutedjo Prihatono	Nihil	BCA Syariah (536)	Nihil	Anggota DPS

J. PAKET ATAU KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS BAGI DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DPS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
<b>A</b>	<b>Remunerasi</b>						
1	Gaji Pokok	3	2,442,802,368	3	1,254,180,924	2	425,525,664
2	Tunjangan	3	641,133,728	3	260,893,077	2	133,712,472
3	Tantiem	3	270,776,275	3	129,613,789	2	39,610,036
4	Bonus	3	Nihil	3	Nihil	2	Nihil
5	Kompensasi Berbasis Saham	3	Nihil	3	Nihil	2	Nihil
6	Remunerasi-Lainnya*)	3	Nihil	3	Nihil	2	Nihil
	Total Remunerasi		3,354,712,271		1,644,687,790		598,848,172
<b>B</b>	<b>Fasilitas Lain</b>						
1	Perumahan	3	Nihil	3	Nihil	2	Nihil
2	Transportasi	3	127,862,508 (1 unit mobil dinas per Direksi)	3	Nihil	2	Nihil
3	Kesehatan	3	70,562,300 (Asuransi Kesehatan + Keluarga inti, MCU + Pasangan)	3	7.878.000 (Fasilitas MCU Komisaris + Pasangan)	2	5.252.000 (Fasilitas MCU DPS + Pasangan)
4	Fasilitas Lain-Lainnya*)	3	57,888,268 (Laptop, HP,	3	18,000,000	2	6,000,000

Handwritten signature and date: 27/10/2025

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
			Tablet Smartphone)				
	Total Fasilitas Lain		256,313,076		25,878,000		11,252,000
<b>C</b>	<b>Total</b>						
	Remunerasi dan Fasilitas Lain		3,611,025,347		1,670,565,790		607,474,172

**K. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH**

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji anggota Direksi terendah	1.25
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris terendah	1.11
Rasio gaji anggota DPS tertinggi terhadap gaji anggota DPS terendah	1.11
Rasio gaji pegawai tertinggi terhadap gaji pegawai terendah	4.51
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Direksi tertinggi	0.48
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji pegawai tertinggi	3.41

**L. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

**1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dan Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun (Januari s.d Desember 2025)**

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	20 Januari 2025	3	1. Evaluasi Kinerja Perusahaan Tahun 2024 2. Progres Merger BPR Syariah HIK dengan BPR Syariah HIK Bekasi 3. Penerapan POJK Terkait Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPR Syariah.
2	3 Februari 2025	16	1. Pembahasan Laporan Hasil Telaah Tentang Masa Jabatan Komisaris BPRS HIK.
3	25 Februari 2025	9	1. Pembahasan Laporan Kinerja Perusahaan (Aspek Operasional & Kepatuhan) 2. Pembahasan Laporan Kinerja Perusahaan (Aspek Bisnis) 3. Pembahasan Evaluasi Kinerja bulan Januari 2025 dan Rencana Strategis Februari 2025 4. Perpanjangan Masa Kontrak Bapak Supardo selaku Konsultan Hukum HIK.
4	8 Maret 2025	11	Pembahasan Persiapan Penilaian Kemampuan & Kepatuhan (PKK) Proses Merger BPR Syariah HIK Bekasi (HIKB) ke BPR Syariah HIK (HIK) :

*Handwritten signature/initials*

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian Informasi Teknis</li> <li>2. Penyampaian Informasi Materi Persiapan PKK Proses Merger HIKB ke HIK</li> <li>3. Informasi Lainnya.</li> </ol>
5	22 April 2025	3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Kinerja Triwulan 1 dan Rencana Strategis Triwulan II Tahun 2025</li> <li>2. Penguatan Likuiditas sebagai antisipasi dampak proses Merger</li> </ol>
6	21 Mei 2025	13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan Evaluasi Kinerja Bulan April 2025, Isu &amp; Rencana Strategis Mei - Juni 2025</li> <li>2. Pembahasan Penyusunan Revisi RBB Tahun 2025</li> <li>3. Informasi Lainnya.</li> </ol>
7	27 Mei 2025	13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan Proyeksi Keuangan Revisi RBB Tahun 2025 (Integrasi Merger HIK Bekasi)</li> <li>2. Pembahasan Progres Rencana Penggabungan (Merger) HIK dengan HIK Bekasi</li> <li>3. Informasi Lainnya.</li> </ol>
8	13 Juni 2025	12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan Tindak Lanjut Pelaksanaan RUPS BPR Syariah HIK</li> <li>2. Penyampaian Informasi Surat Induk HIK Perihal Seleksi Calon Direktur HIK Insan Cita</li> <li>3. Penyampaian Informasi Terkait Aset Ex-KSPPS KUMB</li> <li>4. Informasi Lainnya (Progres Penyelesaian Nasabah Bermasalah Lainnya)</li> </ol>
9	26 Juni 2025	3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Pelaksanaan RUPS BPR Syariah HIK Tahun Buku 2024</li> <li>2. Laporan Kebijakan Manajemen Risiko</li> <li>3. Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern BPR Syariah HIK Tahun 2025</li> <li>4. Pedoman Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> BPR Syariah HIK</li> </ol>
10	24 Juli 2025	13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan Laporan Kinerja Perusahaan Aspek Bisnis bulan Juni 2025</li> <li>2. Pembahasan Laporan Kinerja Perusahaan Aspek Operasional bulan Juni 2025</li> <li>3. Pembahasan Laporan Evaluasi Kinerja Semeseter I - 2025 dan Rencana Strategis Semester II – 2025</li> <li>4. Laporan Tentang Program Kerja SKAI Mengenai Laporan perkembangan pelaksanaan pelaksanaan Strategi Anti <i>Fraud</i> (SAF) semester I</li> <li>5. Laporan Rencana Aksi Korporasi Terkait Rencana Merger Serempak HIK Group</li> <li>6. Laporan Rencana Penanganan Nasabah an. PT Madhav Abhuyudaya Berdikari, Nasabah Hapus Buku an. Denny</li> </ol>

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
			Lazuardi dan Nasabah an. PT Woodlands Propertindo Group.
11	20 Agustus 2025	15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Gambaran Umum Kinerja Juli 2025 dan Laporan TKS Juli 2025</li> <li>2. Laporan Kinerja Bisnis (Pembiayaan) Bulan Juli 2025</li> <li>3. Laporan Rencana Strategis Peningkatan Kualitas Aset</li> <li>4. Laporan Telaah ALCO</li> <li>5. Laporan Kinerja Perusahaan Aspek Operasional bulan Juli 2025</li> <li>6. Laporan Rencana Kenaikan Gaji Karyawan Tahun 2025</li> <li>7. Laporan Usulan <i>Employee Gathering</i> 2025</li> <li>8. Laporan Rencana Strategis Efisiensi Biaya Perusahaan</li> <li>9. Laporan Gerakan Efisiensi Nasional 2025 (GEN 2.5) dan HIK <i>Efficiency Award</i> (HEA) 2025</li> <li>10. Laporan Analisis Pembiayaan PUMBK.</li> </ol>
12	10 September 2025	3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Kinerja BPR Syariah HIK Bulan Agustus 2025</li> <li>2. Penyusunan <i>Risk Acceptance Criteria</i> (RAC) Pembiayaan</li> <li>3. Penguatan Struktur Organisasi BPR Syariah HIK dan Pemilihan Karyawan Terbaik</li> <li>4. Persiapan <i>Merger</i></li> </ol>
13	6 Oktober 2025	11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan III 2025 dan Rencana Strategis Triwulan IV 2025</li> <li>2. Laporan TKS Bulan September 2025</li> <li>3. Laporan Evaluasi NPF September 2025 dan <i>Plan</i> NPF Desember 2025, Progres AYDA dan Hapus Buku, serta serta progres penyelesaian pembiayaan an. KSPPS KUMB dan PUMBK</li> <li>4. Laporan Update Proses Merger</li> <li>5. Laporan Realisasi Program Kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)</li> <li>6. Laporan Rencana Kaji Ulang Fungsi Audit Intern Tahun 2025</li> <li>7. Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Khusus di Kantor Pusat</li> <li>8. Laporan Kinerja Perusahaan Aspek Operasional bulan September 2025</li> <li>9. Laporan Pelindungan Konsumen dan Layanan Pengaduan</li> <li>10. Laporan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme &amp; Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (APU PPT &amp; PPPSPM).</li> <li>11. Laporan Pengikatan Agunan Yang Belum Selesai atas Nasabah Pembiayaan</li> <li>12. Laporan Rencana Perubahan Struktur Organisasi</li> <li>13. <i>Strategic Issues Pasca gathering &amp; Team Building.</i></li> </ol>

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
14	17 Oktober 2025	11	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Bapak Supardo (<i>In House Lawyer</i> BPR Syariah HIK) mengenai progres penanganan nasabah an. PT Muara Berkah Mandiri, PT Tunas Alam Realti dan CV Bhatara Jaya Utama.</li> <li>Laporan Evaluasi Kinerja Bisnis Bulan September 2025</li> <li>Informasi lain-lain (Tata Kelola dan Progres Merger)</li> </ol>
15	12 November 2025	11	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Evaluasi Kinerja Bisnis Bulan Oktober 2025 dan Proyeksi Akhir Tahun 2025.</li> <li>Laporan Evaluasi Kinerja Aspek Operasional Bulan Oktober 2025</li> <li>Laporan Telaah POJK No. 9/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan BPR Syariah terkait Komite Dewan Komisaris</li> <li>Laporan Evaluasi Kinerja Bulan Oktober 2025 dan Rencana Strategis Bulan November 2025</li> <li>Laporan <i>Asset and Liability Committee</i> (ALCO): Usulan Pembukaan Deposito 12 bulan</li> <li>Laporan Evaluasi NPF Oktober 2025 dan Plan NPF Desember 2025</li> <li>Usulan Fasilitas KPRS Karyawan HIK untuk Pembelian Rumah Nasabah Bermasalah</li> <li>Usulan Pro Kontra Penyelesaian Nasabah an. Iswarni, Nidih dan PT Biru Sistem Solusi.</li> </ol>
16	8 Desember 2025	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko</li> <li>Anggota Komite Audit &amp; Anggota Komite Pemantau Risiko</li> <li>Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2026</li> </ol>
17	30 Desember 2025	13	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Proyeksi Portofolio Akhir Tahun</li> <li>Laporan Estimasi NPF Desember 2025</li> <li>Laporan Pro Kontra Penjualan Aset Ciamis (Ex. Jaminan KUMB)</li> <li>Laporan Estimasi Laba Rugi Desember 2025</li> <li>Laporan Progres Merger</li> <li>Laporan Update Pra Akhir Tahun Sisi Kepatuhan (Termasuk Pembahasan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko).</li> </ol>

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Zahrul Hadiprabowo	11	5	94%
2	Noraini Bawazier	7	8	88%
3	Agus Darmawan	16	1	100%

**3. Penyelenggaraan Rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam 1 (satu) Tahun**

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	20 Januari 2025	12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan Laporan Kinerja Perusahaan bulan Desember 2024 &amp; Rencana Strategis Januari 2025</li> <li>2. Pembahasan Laporan Kinerja SKAI BPRS HIK (Periode Januari - Desember 2024)</li> <li>3. Pembahasan Laporan Rencana Pelaksanaan RUPS dan RUPSLB (RUPS Tahunan dan Merger)</li> <li>4. Pembahasan POJK Tata Kelola BPR/BPRS (Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Fungsi Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan)</li> <li>5. Pembahasan Usulan Produk Pembiayaan Sertifikasi Dosen (SERDOS).</li> </ol>
2	06 Februari 2025	10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan Tanggapan Draft Rancangan Pedoman Pembiayaan <i>Salam, Istishna</i> dan <i>Multijasa</i></li> </ol>
3	26 Februari 2025	9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan Penempatan Dana di Bank Konvensional, <i>Murabahah Muallaq</i> dan Surat Pernyataan Bukti Pembelian Barang</li> </ol>
4	8 Maret 2025	11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan Persiapan Penilaian Kemampuan &amp; Kepatuhan (PKK) Proses Merger BPR Syariah HIK Bekasi (HIKB) ke BPR Syariah HIK (HIK) :</li> <li>2. Penyampaian Informasi Teknis</li> <li>3. Penyampaian Informasi Materi Persiapan PKK Proses Merger HIKB ke HIK</li> <li>4. Informasi Lainnya.</li> </ol>
5	20 Maret 2025	10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan Pengelolaan Deposito dan Tabungan ex Nasabah BPRS HIK Bekasi terkait Proses Merger antara BPRS HIK dengan BPRS HIK Bekasi</li> </ol>
6	22 April 2025	13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan Evaluasi Kinerja Triwulan I – 2025</li> <li>2. Pembahasan Rencana Strategis Triwulan II – 2025</li> <li>3. Pembahasan Laporan Kualitas Pembiayaan dan NPF</li> <li>4. Pembahasan Progres Rencana Penggabungan (Merger) HIK dengan HIK Bekasi</li> <li>5. Pembahasan ALCO Bulan April 2025</li> <li>6. Pembahasan Laporan Kinerja Aspek Bisnis Bulan Maret 2025</li> <li>7. Pembahasan Laporan Realisasi Program Kerja SKAI (Periode Januari – Maret 2025)</li> <li>8. Pembahasan Laporan Kinerja Aspek Operasional Bulan Maret 2025</li> <li>9. Pembahasan Laporan Progres Persiapan RUPS.</li> </ol>
7	21 Mei 2025	13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan Evaluasi Kinerja Bulan April 2025, Isu &amp; Rencana Strategis Mei - Juni 2025</li> <li>2. Pembahasan Penyusunan Revisi RBB Tahun 2025</li> <li>3. Informasi Lainnya.</li> </ol>

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
8	27 Mei 2025	13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan Proyeksi Keuangan Revisi RBB Tahun 2025 (Integrasi Merger HIK Bekasi)</li> <li>2. Pembahasan Progres Rencana Penggabungan (Merger) HIK dengan HIK Bekasi</li> <li>3. Informasi Lainnya.</li> </ol>
9	13 Juni 2025	12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan Tindak Lanjut Pelaksanaan RUPS BPR Syariah HIK</li> <li>2. Penyampaian Informasi Surat Induk HIK Perihal Seleksi Calon Direktur HIK Insan Cita</li> <li>3. Penyampaian Informasi Terkait Aset Ex-KSPPS KUMB</li> <li>4. Informasi Lainnya (Progres Penyelesaian Nasabah Bermasalah Lainnya)</li> </ol>
10	18 Juni 2025	14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan Merger Terkait Data Tabungan Nasabah, Rekening <i>Escrow</i></li> <li>2. Komitmen <i>Rate</i> untuk Nasabah Ciledug atas nama Yayasan Dana Sejahtera Mandiri</li> <li>3. Rencana Penyewaan Aset Jaminan Pada Pihak Eksternal (Lembaga Keuangan Konvensional).</li> </ol>
11	26 Juni 2025	11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan Persiapan Pelaksanaan RUPS BPR Syariah HIK Tahun Buku 2024</li> <li>2. Penyampaian Informasi Laporan Kebijakan Manajemen Risiko</li> <li>3. Penyampaian Laporan Pelaksanaan dan Pokok Hasil Audit Intern HIK Tahun 2025</li> <li>4. Penyampaian Informasi Pedoman Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> BPR Syariah HIK.</li> </ol>
12	09 Juli 2025	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan Permintaan Opini tentang Implementasi Pengelolaan Migrasi Produk Tabungan dan Rekening <i>Escrow</i></li> <li>2. Pengelolaan Migrasi Produk Deposito Nasabah BPR Syariah HIK Bekasi terkait Proses Merger BPR Syariah HIK Bekasi kedalam BPR Syariah HIK</li> <li>3. Komitmen Rate Deposito untuk Nasabah Kantor Cabang Ciledug atas nama Yayasan Dana Sejahtera Mandiri dan Penyewaan Aset Tetap Bank kepada Pihak Eksternal.</li> </ol>
13	14 Juli 2025	11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan Hasil Review atas kondisi kolektabilitas Nasabah Pembiayaan Kantor Cabang Karawaci</li> </ol>
14	24 Juli 2025	13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan Laporan Kinerja Perusahaan Aspek Bisnis bulan Juni 2025</li> <li>2. Pembahasan Laporan Kinerja Perusahaan Aspek Operasional bulan Juni 2025</li> <li>3. Pembahasan Laporan Evaluasi Kinerja Semester I - 2025 dan Rencana Strategis Semester II – 2025</li> </ol>

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Laporan Tentang Program Kerja SKAI Mengenai Laporan perkembangan pelaksanaan pelaksanaan Strategi Anti <i>Fraud</i> (SAF) semester I</li> <li>5. Laporan Rencana Aksi Korporasi Terkait Rencana Merger Serempak HIK Group</li> <li>6. Laporan Rencana Penanganan Nasabah an. PT Madhav Abhuyudaya Berdikari, Nasabah Hapus Buku an. Denny Lazuardi dan Nasabah an. PT Woodlands Propertindo Group.</li> </ol>
15	20 Agustus 2025	15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Gambaran Umum Kinerja Juli 2025 dan Laporan TKS Juli 2025</li> <li>2. Laporan Kinerja Bisnis (Pembiayaan) Bulan Juli 2025</li> <li>3. Laporan Rencana Strategis Peningkatan Kualitas Aset</li> <li>4. Laporan Telaah ALCO</li> <li>5. Laporan Kinerja Perusahaan Aspek Operasional bulan Juli 2025</li> <li>6. Laporan Rencana Kenaikan Gaji Karyawan Tahun 2025</li> <li>7. Laporan Usulan <i>Employee Gathering</i> 2025</li> <li>8. Laporan Rencana Strategis Efisiensi Biaya Perusahaan</li> <li>9. Laporan Gerakan Efisiensi Nasional 2025 (GEN 2.5) dan HIK <i>Efficiency Award</i> (HEA) 2025</li> <li>10. Laporan Analisis Pembiayaan PUMBK.</li> </ol>
16	27 Agustus 2025	12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan Sumber Dana Penyelesaian Pembiayaan Skema Lama, Skema Baru dan PUMBK</li> <li>2. Pembahasan Implementasi Produk <i>Cash Waqf Linked Deposit</i> (CWLD) di BPR Syariah HIK.</li> </ol>
17	10 September 2025	12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kinerja Perusahaan Aspek Operasional bulan Agustus 2025</li> <li>2. Laporan Sinkronisasi <i>Risk Acceptance Criteria</i> (RAC) dan IM Pembiayaan</li> <li>3. Laporan Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko untuk Tiap Jenis Risiko</li> <li>4. Laporan Persiapan Pelaksanaan <i>Employee Gathering</i> BPR Syariah HIK 2025</li> <li>5. Laporan Rencana Penguatan Struktur Organisasi</li> <li>6. Usulan Karyawan Terbaik Tahun 2024</li> <li>7. Laporan Evaluasi Kinerja Bulan Agustus 2025 dan Rencana Strategis bulan September 2025</li> <li>8. Laporan Kinerja Bisnis Bulan Agustus 2025.</li> </ol>
18	24 September 2025	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan Permintaan Opini tentang Sumber Dana Penyelesaian Pembiayaan <i>Channeling</i> Skema Baru</li> <li>2. Pembiayaan <i>Channeling</i> Skema Lama dan Pembiayaan Executing yang pernah dikerjasamakan dengan KSPPS KUMB.</li> </ol>

Handwritten signature and initials.

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
19	6 Oktober 2026	7	1. Pembahasan Produk Cash Waqf Link Deposit (CWLD) dengan Dana Talangan dari Nazhir
20	17 Oktober 2025	11	1. Laporan Bapak Supardo ( <i>In House Lawyer</i> BPR Syariah HIK) mengenai progres penanganan nasabah an. PT Muara Berkah Mandiri, PT Tunas Alam Realti dan CV Bhatara Jaya Utama. 2. Laporan Evaluasi Kinerja Bisnis Bulan September 2025 3. Informasi lain-lain (Tata Kelola dan Progres Merger)
21	29 Oktober 2025	2	1. Pembahasan Permohonan Opini Pengakuan Marjin Pendapatan pada Case Nasabah Pembiayaan an. PT Saputra Mega Properti
22	11 November 2025	2	1. Pembahasan Permohonan Opini Sergur dan Review Lampiran Sergur
23	21 November 2025	7	1. Pembahasan Penggunaan Akad <i>Qardh</i> Terkait Penyelesaian Fraud oleh Mantan Pegawai 2. Pembahasan Laporan Pengawasan DPS 3. Pembahasan Pembiayaan Karyawan untuk Penyelesaian Pelunasan Pinjol.
24	29 November 2025	2	1. Pembahasan IM Sergur
25	8 Desember 2025	14	1. Laporan Evaluasi Kinerja Bulan November 2025 dan Rencana Strategis Bulan Desember 2025 2. Laporan Penyusunan Estimasi Bisnis 2025 dan Proyeksi Bisnis 2026 3. Laporan Evaluasi NPF November 2025, Estimasi NPF Desember 2025 dan Proyeksi RBB NPF 2026 4. Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2026 5. Laporan APU PPT dan Pelindungan Konsumen 6. Usulan Neraca & Laba Rugi BPRS HIK - RBB 2026 7. Laporan Rencana Strategis bulan Desember 2025.
26	18 Desember 2025	5	1. Pembahasan Special Nisbah Deposito, Pemberian Hadiah Tabungan dan Pembukaan Deposito dengan Sistem <i>Breakable</i>
27	30 Desember 2025	6	1. Pembahasan Titipan Nasabah a.n. PT Saputra

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)

No	Nama Anggota Dewan DPS	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Dede Abdul Fatah	17	10	100%
2	Sutedjo Prihatono	15	12	100%

*Handwritten signature and initials*

**M. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN**

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:									
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Anggota DPS		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	1	Nihil	Nihil	1
Telah Diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam Proses Penyelesaian	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum Diupayakan Penyelesaiannya**)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

\*) perbaikan data di tahun sebelumnya

**N. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR SYARIAH**

Permasalahan hukum secara perdata dan pidana yang dihadapi BPR Syariah HIK selama periode tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	3	Nihil
Dalam Proses Penyelesaian	0	Nihil
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>Nihil</b>

**O. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana insan BPR Syariah HIK dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan diluar kepentingan perusahaan, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun pihak-pihak lain sehingga insan BPR Syariah HIK tersebut dimungkinkan kehilangan objektivitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai wewenang yang diberikan BPRS kepadanya.

BPR Syariah Harta Insan Karimah telah memiliki kode etik penanganan benturan kepentingan perusahaan yang menjadi ketentuan dan/atau panutan nilai dalam penanganan benturan kepentingan di dalam Perusahaan.

Selama tahun 2025 PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Tidak Memiliki Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana pada tabel berikut:

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Penjelasan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

**P. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN**

Selama Tahun 2025 PT BPR Syariah Harta Insan Karimah tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik kepada pihak-pihak tertentu, sedangkan penyaluran dana untuk kegiatan sosial di jelaskan sebagai berikut:

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	11 Februari 2025	Sosial	Pemberian donasi untuk perbaikan Rumah Peradaban.	Rumah Peradaban	Rp 8,500,000
2	28 Februari 2025	Sosial	Donasi Bantuan Sarana & Prasarana Masjid	Masjid di sekitar Unit Kerja/ Jaringan Kantor BPR Syariah HIK	Rp 15,501,400
3	07 Maret 2025	Sosial	Pemberian Bingkisan Ramadhan yang ditujukan untuk Mustahik agar mereka turut merasakan kebahagiaan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, yang bekerjasama dengan IZI.	Mustahik di sekitar Unit Kerja/ Jaringan Kantor BPR Syariah HIK	Rp 15,000,000
4	07 Maret 2025	Sosial	Pemberian paket sembako yang ditujukan untuk Anak Yatim & Dhuafa agar mereka turut merasakan kebahagiaan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, yang	Yatim dan Dhuafa di sekitar seluruh Unit Kerja/Jaringan Kantor BPR Syariah HIK	Rp 15,000,000

*Handwritten signature and date:*  
28/03/25

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
			bekerjasama dengan PPPA DAQU		
5	11 Maret 2025	Sosial	Bantuan Peduli Bencana Alam di Bekasi yang berkolaborasi dengan HIMBARSI	HIMBARSI	Rp 3,700,000
6	17 Maret 2025	Sosial	Bantuan Pemberian Beras ke Pondok Pesantren Mitra HIK adalah inisiatif sosial yang bertujuan untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan dengan menyediakan beras berkualitas. Program ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan kepedulian antar sesama. Dengan menciptakan dampak positif bagi komunitas.	Pondok Pesantren Mitra HIK	Rp 14,400,000
7	14 Maret 2025	Sosial	Momen penuh berkah dengan program Buka Puasa Bersama Fakir Miskin. Acara ini memberikan kesempatan untuk berbagi hidangan berbuka, serta memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian sosial. Dengan berpartisipasi memberikan kebahagiaan kepada mereka yang	Mustahik Binaan Rumah Yatim	Rp 6,750,000

*Handwritten signature/initials*

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
			membutuhkan, menjadikan setiap suapan lebih bermakna. Bekerjasama dengan Rumah Yatim		
8	18 Maret 2025	Sosial	Pemberian Parsel yang ditujukan untuk Mustahik agar mereka turut merasakan kebahagiaan Hari Raya Idul Fitri, yang bekerjasama dengan Rumah Yatim.	Mustahik Binaan Rumah Yatim	Rp 12,000,000
9	19 Maret 2025	Sosial	Donasi bantuan untuk Palestina adalah kesempatan berharga untuk memberikan dukungan kepada Rakyat Palestina, Dengan berkontribusi memiliki dampak dalam meringankan penderitaan dan membangun harapan baru.	Palestina	Rp 10,135,000
10	19 Maret 2025	Sosial	Pemberian Bingkisan Ramadhan yang ditujukan untuk Mustahik agar mereka turut merasakan kebahagiaan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, yang bekerjasama dengan BAZNAS.	Mustahik di sekitar Unit Kerja/Jaringan Kantor BPR Syariah HIK	Rp 18,000,000
11	21 Maret 2025	Sosial	Pemberian Bingkisan yang ditujukan untuk Mustahik agar mereka turut merasakan	Mustahik di sekitar Unit Kerja/Jaringan	Rp 15,000,000

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
			kebahagian Hari Raya Idul Fitri, yang bekerjasama dengan PPPA DAQU.	Kantor BPR Syariah HIK	
12	Pemberian Beasiswa TA 2024-2025	Sosial	Beasiswa untuk siswa kurang mampu yang termasuk golongan fakir/miskin dan berprestasi.	Sekolah/ Yayasan Pendidikan Mitra BPR Syariah HIK	Rp 146,020,000
13	19 Maret 2025	Sosial	GASSEBU (Gerakan Sedekah Seribu) adalah inisiatif harian yang mengajak Anda untuk berbagi kebaikan dengan menyisihkan seribu rupiah setiap hari. Untuk berbagi di bulan Ramadhan	Mustahik di sekitar Unit Kerja/Jaringan Kantor BPR Syariah HIK	Rp 9,150,000
14	20 Juni 2025	Sosial	GASSEBU (Gerakan Sedekah Seribu) adalah inisiatif harian yang mengajak Anda untuk berbagi kebaikan dengan menyisihkan seribu rupiah setiap hari. Untuk berbagi daging Qurban di hari Raya Idul Adha	Masjid dan Pondok Pesantren Binaan BPR Syariah HIK	Rp 12,763,400
15	11 Juli 2025	Sosial	GASSEBU (Gerakan Sedekah Seribu) adalah inisiatif harian yang mengajak Anda untuk berbagi kebaikan dengan menyisihkan seribu rupiah setiap hari. Untuk berbagi dengan anak yatim.	Anak Yatim di sekitar Unit Kerja/ Jaringan Kantor BPR Syariah HIK	Rp 28,700,000

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
16	14 Oktober 2025	Sosial	Beasiswa untuk Siswa/Mahasiswa kurang mampu yang termasuk golongan fakir/miskin/ dan berprestasi.	Arrum Kurnia Suci	Rp 2,200,000
17	05 Desember 2025	Sosial	Bantuan Peduli Bencana Alam di Sumatera yang berkolaborasi dengan HIMBARSI	HIMBARSI	Rp 30,000,000

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN  
LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA**

Dengan ini memberikan persetujuan atas Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2025 untuk dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Tangerang, 29 April 2026

**PT BPR Syariah Harta Insan Karimah**

  
**Alfi Wijaya**  
**Direktur Utama**



  
**Zahrul Hadiprabowo**  
**Komisaris Utama**